

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, pengelolaan perkebunan di ketiga wilayah pengamatan (Katibung, Merbau Mataram, dan Rajabasa) belum berkelanjutan karena ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, dan sosial) belum berjalan secara terpadu.
 - a. Status keberlanjutan Kecamatan Katibung untuk dimensi ekologi (nilai indeks 52,68) dan dimensi sosial (nilai indeks 51,12) adalah cukup berkelanjutan, sedangkan status untuk dimensi ekonomi (nilai indeks 48,92) adalah kurang berkelanjutan.
 - b. Status keberlanjutan Kecamatan Merbau Mataram untuk dimensi ekologi (nilai indeks 51,12) dan dimensi sosial (nilai indeks 51,39) adalah cukup berkelanjutan, sedangkan status untuk dimensi ekonomi (nilai indeks 45,98) adalah kurang berkelanjutan.
 - c. Status keberlanjutan Kecamatan Rajabasa berkebalikan dengan dua kecamatan yang lain, dimana status untuk dimensi ekologi (nilai indeks 49,51) dan dimensi sosial (nilai indeks 47,36) adalah kurang berkelanjutan, sedangkan status untuk dimensi ekonomi (nilai indeks 58,58) adalah cukup berkelanjutan.
2. Strategi pengelolaan berkelanjutan yang sesuai diterapkan pada perkebunan kakao di Kabupaten Lampung Selatan yaitu:
 - a. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang mampu mendukung keberlanjutan usaha tani, di antaranya: penguatan dan pemberdayaan kelembagan tani, budidaya tanaman kakao sesuai GAP, pembuatan pupuk organik, panen dan pasca panen kakao, kewirausahaan, SLPHT kakao.

- b. Pengelolaan perkebunan kakao terpadu, yaitu pengelolaan dengan memadukan penanaman kakao dengan berbagai tanaman penayang serta dengan sektor peternakan (kakao-sapi atau kakao-kambing).

5.2 Saran

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menjadikan informasi mengenai status keberlanjutan di tiga kecamatan yang ada di Lampung Selatan ini sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Perlu ada evaluasi mengenai komoditi atau ternak yang paling sesuai untuk dikelola bersama dengan kakao sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial.
2. Disarankan pada pihak pemerintah daerah untuk:
 - Menginventarisasi kebutuhan pelatihan untuk kelompok tani-kelompok tani;
 - Mengkaji kebutuhan sebelum memberikan bantuan sehingga bantuan yang diberikan sesuai (seperti kapasitas alat pencacah untuk UPPO, sebaran jalan produksi dan embung, dan sebagainya);
 - Melakukan kerjasama dengan lembaga permodalan, pelaku usaha pengolahan kakao, atau pihak lain yang dapat membantu usaha perkebunan petani.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk menerapkan *integrated farming system*, yaitu dengan menanam beragam tanaman penayang bermanfaat dalam lahan kakao serta memadukan pengelolaan perkebunan dengan ternak ruminansia (sapi atau kambing).